

Studi Komparatif Kebijakan Pemerintah Jepang Dan Indonesia Dalam Ekonomi Dan Industrialisasi

Lina Puji Lestari

Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

linalestari@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Economic policies and industrialization are important factors in the development of a country. This study compares the policies of the Japanese government after World War II and Indonesia after independence, analyzing the policy achievements of both countries as well as identifying the factors that influence government policies during development. This study uses a qualitative comparative method with a literature review approach. Data and information are collected from many secondary sources, such as books, journal articles, research papers, and publications from governments and international organizations. The results of the study found that Japan adopted a "developing country" approach with government intervention through the Ministry of International Trade and Industry (MITI) which succeeded in growing and encouraging industrialization and economic growth rapidly. This policy is supported by political stability, effective governance, a focus on strategic industrial growth, and technology transfer. On the other hand, Indonesia implements several policies, ranging from market liberalization to a guided economy with more varied results and influenced by external and political factors. Indonesia must strengthen institutional capacity, improve governance, and prioritize economic diversification into strategic sectors, international collaboration and technology transfer can also support Indonesia's future industrialization efforts.

Keywords: Japan, Indonesia, Economic Policy, Industrialization, Comparison

ABSTRAK

Kebijakan ekonomi dan industrialisasi merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Penelitian ini membandingkan kebijakan pemerintah Jepang pasca Perang Dunia II dan Indonesia setelah kemerdekaan, menganalisis capaian kebijakan kedua negara sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah selama pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data dan informasi dikumpulkan dari banyak sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, makalah penelitian, dan publikasi dari pemerintah dan organisasi internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mengadopsi pendekatan "negara berkembang" dengan intervensi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) yang berhasil menumbuhkan dan mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Kebijakan ini didukung oleh stabilitas politik, tata kelola yang efektif, fokus pada pertumbuhan industri strategis, dan transfer teknologi. Di sisi lain, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, mulai dari liberalisasi pasar hingga ekonomi terpimpin dengan hasil yang lebih bervariasi dan terpengaruh oleh faktor eksternal dan politik. Indonesia harus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan tata kelola dan memprioritaskan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor strategis, kolaborasi internasional dan transfer teknologi juga dapat mendukung upaya industrialisasi Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Jepang, Indonesia, Kebijakan Ekonomi, Industrialisasi, Perbandingan

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi dan industrialisasi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kecepatan pembangunan Bangsa. Jepang dan Indonesia dua negara dengan kondisi geografis dan warisan sejarah yang berbeda di Asia, menawarkan studi kasus yang menarik untuk membandingkan kebijakan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Setelah Perang Dunia II, Jepang berhasil menyelesaikan rekonstruksi ekonomi yang luar biasa dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global. Sebaliknya, Indonesia, sejak merdeka telah mengalami berbagai tahapan pembangunan ekonomi dan industrialisasi dengan karakteristik dan tantangan uniknya sendiri.¹ Memahami perbedaan dan persamaan kebijakan antara kedua negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka, dapat memberikan wawasan berharga bagi negara berkembang lainnya, seperti Indonesia saat ini dan di masa depan.²

Jepang, setelah kehancuran Perang Dunia II, menunjukkan pemulihan ekonomi yang luar biasa, yang dikenal sebagai "*The Japanese Miracle*".³ Periode pertumbuhan pesat ini berlangsung dari pertengahan 1950-an hingga awal 1970-an, ditandai dengan peningkatan yang signifikan dalam *output* industri, transformasi ini hasil dari peran aktif pemerintah Jepang, khususnya melalui Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) yang didirikan pada tahun 1949. Sebagai perbandingan, Indonesia, yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, mewarisi ekonomi dengan sektor pertanian dan pertambangan yang diciptakan selama pendudukan kolonial Belanda. Upaya Indonesia dalam industrialisasi telah melalui sejumlah tahap, mulai dari kebijakan ekonomi terpandu di bawah kepemimpinan Soekarno hingga kebijakan yang lebih didorong oleh pasar di bawah kepemimpinan Soeharto, serta reformasi ekonomi pasca-1998.⁴

MITI memainkan peran sentral dalam merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi terstruktur. Kementerian ini tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan industri dalam negeri menuju sektor yang berdaya saing global. Dengan kebijakan insentif, perlindungan selektif, dan kerja sama dengan komunitas bisnis, MITI telah berhasil menciptakan suasana bisnis yang kondusif bagi perkembangan perusahaan Jepang. Salah satu

¹ James dan W, "Lessons From Development of the Indonesian Economy," 2000.

² Suzuki dan T, "History of Japanese economic thought," 2020.

³ Johnson dan C, "MITI dan keajaiban Jepang: pertumbuhan kebijakan industri, 1925-1975," 1982.

⁴ James dan W.

contoh keberhasilan MITI adalah mendukung industri otomotif dan elektronik, yang kini menjadi sektor andalan Jepang di tingkat internasional.⁵

Jepang dan Indonesia memiliki kondisi dan karakteristik ekonomi yang spesifik secara historis dan kebijakan. Jepang dikenal dengan model ekonomi berbasis industri yang terstruktur dan terarah yang didukung oleh peran aktif pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI).⁶ Intervensi kebijakan ekonomi Jepang telah menghasilkan industri yang kuat dengan daya saing global yang tinggi. Sebaliknya, sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dari era kolonial ke era modern. Pada masa penjajahan, perekonomian Indonesia lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan penjajah. Setelah kemerdekaan, Indonesia memiliki beberapa fase kebijakan ekonomi, antara lain ekonomi terpandu di era Soekarno dengan fokus pada nasionalisasi aset asing dan ekonomi yang lebih terpusat. Pada era Orde Baru Soeharto, kebijakan ekonomi bergeser ke arah pendekatan ekonomi berorientasi pasar dengan gaya pembangunan yang didukung oleh investasi asing dan eksploitasi sumber daya alam.⁷

Pasca krisis 1998 dan transisi ke era reformasi dan demokrasi, Indonesia terus melakukan reformasi ekonomi, termasuk desentralisasi fiskal dan politik, serta upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing.⁸ Kebijakan industrialisasi Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari substitusi impor pada awal kemerdekaan hingga promosi ekspor pada masa Orde Baru, dan kini berfokus pada pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, kesenjangan infrastruktur, dan deindustrialisasi.⁹

Studi pustaka mengenai keajaiban ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II secara luas mengakui periode pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan yang dialami negara tersebut. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang rata-rata sekitar 10% per tahun dari tahun 1950-an hingga awal 1970-an, salah satu periode pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah.¹⁰ Keajaiban Jepang menekankan peran sentral Kementerian Perdagangan dan Industri

⁵ Suzuki dan T.

⁶ Johnson dan C, "MITI dan keajaiban Jepang: pertumbuhan kebijakan industri, 1925-1975."

⁷ James dan W.

⁸ Breuer dan L, "Realizing Indonesia's economic potential: An overview," 2018.

⁹ "Navigating Indonesia's Economic Growth: Balancing Progress and Sustainability," 2025

<<https://setkab.go.id/navigating-indonesias-economic-growth-balancing-progress-and-sustainability/>>.

¹⁰ Francks dan P, "Japanese economic development: theory and practice," 2015.

Internasional (MITI), bagaimana kementerian ini menjadi aktor utama dalam merumuskan dan mengarahkan ekspansi ekonomi nasional Jepang dengan kombinasi otoritas hukum, kontrol valuta asing, kebijakan perpajakan, dan kapasitas untuk menggunakan berbagai kebijakan moneter dan fiskal lainnya, secara aktif membimbing dan mendukung pengembangan industri strategis.¹¹

Kolaborasi antara negara dan sektor bisnis strategis telah lama diakui sebagai ciri khas sistem ekonomi Jepang, tetapi peran negara dalam kolaborasi ini sering kali tidak dianalisis secara mendalam, kemampuan MITI untuk memastikan penyerapan teknologi maju yang diimpor bersama dengan kebijakan yang memastikan pertumbuhan pasar internal, sangat penting dalam mentransformasi struktur industri Jepang dan mendorong strategi ekspornya. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa strategi pengembangan industri ini juga menimbulkan biaya yang signifikan bagi masyarakat Jepang dan usaha kecil dan menengah.¹² Beberapa kritikus berpendapat bahwa Johnson mungkin melebih-lebihkan peran MITI dan kurang memperhatikan kontribusi sektor swasta terhadap kejayaan ekonomi Jepang.¹³ Pandangan alternatif menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih berorientasi pasar, seperti pemotongan pajak dan kebebasan ekonomi, mungkin memainkan peran yang lebih besar daripada intervensi MITI.¹⁴ Terlepas dari perdebatan ini, MITI "*The Miracle of Japan*" tetap menjadi referensi standar dalam memahami peran penting birokrasi ekonomi terpimpin yang mendorong Jepang menjadi negara industri maju.¹⁵

Jepang adalah salah satu negara maju di benua Asia yang sangat dihormati dan diperhitungkan untuk menjalin kerja sama dan hubungan baik di bidang apa pun. Hal ini mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan Jepang sebagai mitra penting dalam upaya memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Kesepakatan pertama untuk melakukan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan Jepang, kerja sama bilateral tersebut disingkat IJEPA atau *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang*.¹⁶ Pada dasarnya pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor industri yang beroperasi dalam skala dunia. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, menyebutkan cita -

¹¹ Johnson dan C, "MITI and the Japanese Miracle," 2001.

¹² Johnson dan C, "MITI dan kejayaan Jepang: pertumbuhan kebijakan industri, 1925-1975."

¹³ Hardi dan I, "Decomposed Impact of Democracy on Indonesia's Economic Growth," 2023.

¹⁴ O'Bryan dan S, "The growth idea: purpose and prosperity in postwar Japan," 2009.

¹⁵ Johnson dan C, "MITI dan kejayaan Jepang: pertumbuhan kebijakan industri, 1925-1975."

¹⁶ Hidayat dan A, "Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)," 2022.

cita negara Indonesia menjadi negara industri tangguh dalam tujuan pembangunan perindustrian.¹⁷

Studi komparatif langsung antara kebijakan ekonomi dan industrialisasi Jepang dan Indonesia masih relatif terbatas. Namun, beberapa penelitian telah menyoroti aspek-aspek tertentu dari hubungan ekonomi kedua negara, seperti kemitraan ekonomi (IJEPA).¹⁸ Studi efektifitas transfer teknologi¹⁹ dan potensi adopsi strategi efisiensi energi Jepang di Indonesia.²⁰ Secara umum, perbandingan seringkali menyoroti perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan fokus kebijakan antara kedua negara.²¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi komparatif tentang kebijakan ekonomi dan industrialisasi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pasca-Perang Dunia II dan pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan membandingkan pendekatan, tujuan, dan pencapaian yang dicapai oleh kedua negara, serta menentukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pembangunan mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji relevansi pengalaman Jepang, khususnya peran MITI, dengan konteks pembangunan ekonomi dan industrialisasi Indonesia saat ini dan di masa depan. Kerangka penelitian akan dimulai dengan tinjauan literatur menyeluruh, kemudian analisis kebijakan ekonomi dan industrialisasi di kedua negara, perbandingan keduanya secara langsung, pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kebijakan, evaluasi relevansi kebijakan Jepang dengan Indonesia, dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui pendekatan deskriptif komparatif. Informasi sekunder dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, dan laporan tentang kebijakan ekonomi yang merinci kebijakan ekonomi di Jepang dan Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan ekonomi Jepang dan Indonesia, analisis historis untuk menelusuri perkembangan industrialisasi di kedua negara, dan analisis kebijakan publik untuk memahami dampak intervensi pemerintah

¹⁷ Murti dan H, "Studi Perbandingan Kebijakan Industri 4," 2021.

¹⁸ Stott dan D, "The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?," 2008.

¹⁹ Linbland dan J, "Indonesian economic development and Japanese technology," 2002.

²⁰ Panjaitan dan T, "Drawing Insights from Japan's Energy Efficiency Policies for Indonesia's Progress," 2024.

²¹ Soehardjo dan J, "The hidden layers of resistance to dominant HRM transfer: Evidence from Japanese management practice adoption in Indonesia," 2023.

terhadap pertumbuhan industri. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek kebijakan pemerintah, strategi industri, dan pembangunan ekonomi kedua negara.

Kerangka teoritis yang relevan untuk penelitian ini termasuk teori negara pembangunan (*developmental state theory*) yang sering digunakan untuk menganalisis keberhasilan industrialisasi di Asia Timur, termasuk Jepang.²² Teori ini menekankan peran aktif dan strategis negara dalam memandu pembangunan ekonomi melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan kerja sama yang erat dengan sektor swasta. Model Asia Timur yang diinisiasi oleh Jepang juga dapat diterapkan, dengan karakteristik utama seperti peran pemerintah yang kuat dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis, promosi ekspor, dan tingkat tabungan yang tinggi.²³ Sebaliknya, Indonesia, dengan transisi民主krasinya seringkali dianalisis dengan konsep yang disebut "Konsensus Jakarta" yang menekankan pada sistem presidensial berbasis multipartisme demokratis dan reformasi ekonomi yang berorientasi pasar.²⁴ Memahami perbedaan teoritis akan sangat penting untuk menganalisis strategi kebijakan dan proses pembangunan pada kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Komparatif: Jepang dan Indonesia

a.) Pendekatan Kebijakan

Pendekatan Jepang terhadap kebijakan ekonomi dan industrialisasi pasca Perang Dunia II sangat dipengaruhi oleh model "*development state*".²⁵ Model ini ditandai dengan peran aktif dan strategis pemerintah, khususnya MITI, dalam memandu dan mengarahkan pembangunan ekonomi melalui perencanaan industri yang terarah, kontrol valuta asing, promosi ekspor, dan fasilitasi transfer teknologi. Birokrasi yang kuat dan terpusat, dengan MITI sebagai ujung tombaknya, memainkan peran kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ini, bekerja sama erat dengan sektor swasta melalui keiretsu. Tujuan utama Jepang adalah untuk mengejar dan melampaui kekuatan industri Barat melalui fokus yang kuat pada pengembangan industri manufaktur dan teknologi tinggi.²⁶

²² L C Bresser-Pereira, "Models of the developmental state," *CEPAL Review*, 2019.128 (2019), 35–47.

²³ Singh dan J, "Routledge," 2020.

²⁴ James dan W.

²⁵ Bresser-Pereira.

²⁶ Okazaki dan T, "Industrial Policy in Japan: 70-Year History since World War II," 2017.

Kebijakan ekonomi dan strategi industrialisasi Indonesia sejak memperoleh kemerdekaan, sebaliknya, lebih bervariasi dan dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan politik dan kondisi eksternal. Indonesia telah mengalami fase ekonomi terpimpin dengan dominasi negara, liberalisasi pasar yang lebih luas, dan transisi demokrasi yang berorientasi pada reformasi ekonomi yang berorientasi pada pasar. Indonesia juga lebih bergantung pada pertanian dan sumber daya alam secara historis meskipun ada upaya untuk mendorong industrialisasi. Birokrasi di Indonesia lebih fragmentatif dan dipengaruhi oleh kondisi politik daripada Jepang. Model pembangunan Indonesia, atau sering dikenal sebagai "Konsensus Jakarta," mendahulukan demokrasi dan mekanisme pasar, yang berbeda dengan model negara pembangunan Jepang yang sentralistik dan intervensionis.²⁷

b). Tujuan Kebijakan

Tujuan utama kebijakan ekonomi dan industrialisasi Jepang pasca Perang Dunia II adalah untuk melakukan rekonstruksi ekonomi yang lebih cepat, mencapai swasembada, dan menjadi kekuatan ekonomi global yang kompetitif. Berfokus pada pengembangan industri-industri strategis dengan tingkat nilai tambah tinggi dan potensi ekspor besar, yaitu baja, otomotif, dan elektronik.²⁸

Tujuan kebijakan ekonomi dan industrialisasi Indonesia telah berkembang seiring waktu. Pada awal masa kemerdekaan, tujuannya adalah membentuk ekonomi nasional mandiri dan mengurangi ketergantungan warisan kolonial. Selama Orde Baru, fokusnya dipindahkan kepada pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pengangkatan kemiskinan, dengan penekanan pada pengembangan sektor pertanian dan industri berdasarkan sumber daya alam. Pada pasca-Suharto era, tujuannya antara lain mencakup reformasi ekonomi, menarik investasi asing, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat daya saing industri, termasuk melalui industrialisasi hilir.²⁹

c). Persamaan dan Perbedaan

Meskipun ada perbedaan yang sangat besar, ada beberapa kesamaan antara kebijakan ekonomi dan industrialisasi Indonesia dan Jepang. Kedua negara menggunakan kebijakan substitusi impor pada tahap awal pengembangan untuk melindungi industri domestik yang baru lahir dari

²⁷ Hardi dan I.

²⁸ Linbland dan J.

²⁹ "Navigating Indonesia's Economic Growth: Balancing Progress and Sustainability."

persaingan luar negeri. Selanjutnya, kedua negara juga memahami pentingnya promosi ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa. Selain itu, Jepang dan Indonesia sama-sama sadar akan pentingnya industrialisasi sebagai kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan standar hidup.³⁰ Faktor budaya sebagai etos kerja yang berorientasi kelompok di Jepang dan semangat gotong royong di Indonesia juga memiliki kontribusi pada usaha pembangunan ekonomi, meskipun dalam cara yang berbeda.³¹

Perbedaan utama antara kebijakan ekonomi dan industrialisasi Jepang dan Indonesia terletak pada tingkat dan sifat intervensi pemerintah dalam perekonomian. Jepang mengadopsi model negara berkembang dengan intervensi pemerintah dalam bentuk MITI, yang memiliki kapasitas luar biasa untuk menahkodai dan melaksanakan kebijakan industri strategis.³² Sebaliknya, Indonesia cenderung memiliki intervensi negara yang lebih sporadis dan didorong oleh politik, dengan tantangan dalam efisiensi birokrasi dan prevalensi korupsi.³³

Perbedaan signifikan lainnya adalah penekanan pada sektor ekonomi. Secara strategis, Jepang memprioritaskan pengembangan industri manufaktur dan teknologinya, memungkinkan negara tersebut menjadi pemimpin dalam ekonomi global.³⁴ Sebaliknya, secara historis, Indonesia lebih bergantung pada industri, pertanian, sumber daya alam dan maritim, yang mengakibatkan lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.³⁵ Kualitas kelembagaan dan tata kelola juga merupakan perbedaan penting. Jepang berhasil mengembangkan birokrasi yang kompeten dan efisien yang menjunjung tinggi kunci dalam keberhasilan ekonomi negara. Meski reformasi telah dilaksanakan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan tata kelola, mengurangi korupsi, dan memperkuat kelembagaan. Faktor geopolitik juga berkontribusi pada peran yang berbeda. Jepang mendapat manfaat dari konteks Perang Dingin dan AS, yang memberikan akses dan stabilitas ekonomi. Indonesia, sebagai negara non-blok, memiliki dinamika hubungan internasional yang berbeda.³⁶

³⁰ Bresser-Pereira.

³¹ Francks dan P.

³² Bhuiyan dan M, "The miracle of the Japanese Economy after the Second World War (WW2)," 2019.

³³ Fajrin dan R, "No Title," 2022.

³⁴ Francks dan P.

³⁵ Fajrin dan R.

³⁶ Murti dan H.

d). Hasil yang Dicapai

Hasil dari kebijakan ekonomi dan industrialisasi di kedua negara sangat berlawanan. Jepang beralih menuju "Keajaiban Ekonomi" dengan tingkat pertumbuhan PDB yang sangat tinggi dan transformasi menjadi pemain ekonomi dunia bersama industri manufaktur dan teknologi maju. Jepang sukses menyelenggarakan diversifikasi ekonomi dan memperbaiki daya saing internasionalnya secara signifikan.³⁷

Pembangunan ekonomi dan industrialisasi Jepang Pasca Perang Dunia II sangat efektif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural yang signifikan. Perencanaan strategis model MITI "negara pembangunan", alokasi sumber daya, promosi ekspor, dan infrastruktur teknologi memungkinkan Jepang untuk mengembangkan industri yang kompetitif secara global dan menjadi kekuatan ekonomi terpenting di dunia.³⁸ Namun, penting untuk mengakui bahwa faktor-faktor lain, seperti konteks geopolitik Perang Dingin, AS, etos kerja rakyat Jepang, dan investasi yang signifikan dalam pendidikan, juga memengaruhi keberhasilan Jepang. Ada juga perdebatan mengenai bagaimana peran MITI menjadi fokus utama, dengan beberapa individu berpendapat bahwa kebijakan yang lebih berorientasi pasar juga mempertahankan peran penting.³⁹

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sejak kemerdekaan, terutama dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih bertahap dan terkadang rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk krisis keuangan dan fluktuasi harga komoditas. Perekonomian Indonesia tetap didominasi oleh sektor komoditas, dan upaya industrialisasinya dihadapkan pada deindustrialisasi dan ketergantungan pada sumber daya alam. Tingkat industrialisasi dan kemampuan teknologi Indonesia jauh tertinggal dari Jepang.⁴⁰

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Kebijakan

a). Faktor Internal

³⁷ Song dan Q, "Political Economy Analysis of Significant Roles of MITI in Japan's Industrial Policies During Japan's Post-war Economic Miracle Period," 2022.

³⁸ Song dan Q.

³⁹ Reed dan L, "What caused Japan's post-war economic miracle," 2022.

⁴⁰ Resosudarmo dan B, "The political economy of Indonesian economic reforms: 1983–2000," 2006.

- I. **Sistem dan stabilitas politik:** Stabilitas politik di bawah kepemimpinan Partai Liberal (LDP), yang telah lama ada di Jepang, memberikan landasan yang kuat untuk implementasi kebijakan dan kebijakan ekonomi di bawah Soeharto. Sebaliknya, Indonesia mengalami periode ketidakstabilan politik selama tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto dan transisi menuju demokrasi pada tahun 1998.⁴¹ Transisi ini, meskipun bermanfaat dalam hal partisipasi politik dan kebebasan, juga menimbulkan pertanyaan tentang koherensi kebijakan dan efektivitas implementasinya.⁴²
- II. **Kapasitas Kelembagaan dan Birokrasi:** Birokrasi Jepang, dan terutama MITI, dikenal karena kompetensi, efisiensi, dan orientasi teknokratisnya yang sangat penting bagi keberhasilan kebijakan ekonominya.⁴³ Di Indonesia, reformasi birokrasi dan antikorupsi tetap menjadi isu signifikan yang dapat membatasi efektivitas kebijakan ekonomi dan industrialisasi.⁴⁴
- III. **Faktor Sosial dan Budaya:** Budaya Jepang, dengan fokus pada etika kerja, disiplin, orientasi kelompok, dan kepatuhan terhadap pendidikan, yang disebut-sebut sebagai faktor di balik keberhasilan ekonominya. Indonesia, yang sangat beragam secara budaya dan sosial, memiliki jenis dinamika lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ekonomi.⁴⁵
- IV. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi awal Jepang dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan, mencetak tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industriasi dan ekonomi.⁴⁶ Indonesia terus berusaha meningkatkan pendidikan kualitas dan keterampilan tenaga kerjanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.⁴⁷

b). Faktok Eksternal

- I. **Konteks Geopolitik:** Aliansi strategis antara Jepang dan Amerika Serikat memberikan kerja sama ekonomi, akses pasar, dan perlindungan bagi Jepang, yang sangat membantu pertumbuhan dan pembangunan

⁴¹ F Labib dan S A Lila, "The Influence of Political Stability on Indonesia's Gross Domestic Product: English," *Asian Economic And Business Development*, 6.1 (2023), 31–35.

⁴² Resosudarmo dan B.

⁴³ Song dan Q.

⁴⁴ Breuer dan L.

⁴⁵ Francks dan P.

⁴⁶ Johnson dan C, "MITI and the Japanese Miracle."

⁴⁷ Resosudarmo dan B.

ekonominya.⁴⁸ Indonesia, dengan kebijakan eksternal non-bloknya, memiliki hubungan internasional yang berbeda.⁴⁹

- II. **Kondisi Ekonomi Global:** Jepang mendapat manfaat dari kondisi ekonomi global yang telah ada sejak awal perkembangannya. Sebaliknya, perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas global, yang mengakibatkan pertumbuhan pesat selama periode permintaan komoditas yang tinggi tetapi juga penurunan harga.⁵⁰
- III. **Bantuan dan Investasi Asing:** AS keuangan bantuan memainkan peran penting dalam tahap awal perekonomian Jepang. Pelonggaran investasi juga sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, terutama sejak era Orde Baru.⁵¹ Kerja sama ekonomi dengan negara berkembang, seperti Jepang, melalui IJEPA, juga dapat menguntungkan investasi, transfer teknologi, dan akses pasar.⁵²

KESIMPULAN

Penelitian komparatif ini membuktikan bahwa Indonesia dan Jepang memang menempuh jejak yang berbeda di dalam kebijakan industrialisasi dan ekonomi mereka. Jepang berbekal dengan model "*development state*" melalui peran sentral MITI, yang berhasil menumbuhkan dan mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan pesat pasca perang dunia kedua. Keberhasilan kebijakan ini didukung stabilitas politik, birokrasi efektif, fokus strategis di industri manufaktur dan teknologi, serta konteks geopolitik yang menguntungkan. Di sisi lain, Indonesia sejak kemerdekaannya, telah melakukan beberapa fase kebijakan dengan hasil yang lebih bervariasi. Walaupun sudah mencapai kemajuan yang signifikan, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kinerjanya ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Perbedaan utama terletak pada tingkat dan sifat intervensi negara, fokus sektoral ekonomi, kualitas lembaga, dan dampak faktor eksternal.

Berdasarkan analisis komparatif ini, berikut rekomendasi kebijakan dapat dibuat untuk Indonesia:

⁴⁸ Song dan Q.

⁴⁹ Linbland dan J.

⁵⁰ Jasiyah dan R, "Indonesia's economic growth projections 2023-2025: empirical data analysis," 2024.

⁵¹ Reed dan L.

⁵² Y Avivi dan M Siagian, "Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral dengan Jepang Studi Kasus: Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA)," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3.1 (2020), 49–61 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>>.

1. Memperkuat perencanaan strategis: Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas perencanaan strategisnya dalam merumuskan kebijakan industri yang terfokus dengan visi jangka panjang, mengidentifikasi sektor bernilai tambah tinggi dengan potensi daya saing global.
2. Peningkatan efisiensi dan transparansi birokrasi: Usaha berkelanjutan untuk mereformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menghilangkan korupsi sangat perlu untuk memastikan implementasi kebijakan yang berpengaruh dan menarik investasi.
3. Investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi: Meningkatkan investasi yang signifikan dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan R&D diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi Indonesia.
4. Diversifikasi ekspor: Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku dan mencoba meningkatkan ekspor barang dan jasa manufaktur bernilai tambah tinggi.
5. Penciptaan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi: Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, dapat diprediksi, dan menarik bagi investor domestik dan asing melalui supremasi hukum dan kebijakan yang konsisten.
6. Tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan: Perencanaan rencana jangka panjang untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi pasca-sektor komoditas sangat tepat untuk menghindari keterjebakan ketergantungan komoditas.

Meskipun Indonesia memiliki konteks dan masalah yang berbeda dibandingkan dengan Jepang, pengalaman Jepang dalam mencapai transformasi ekonomi yang luar biasa dapat memberikan pelajaran penting. Dengan mengintegrasikan pelajaran keberhasilan Jepang pada kondisi dan prioritasnya di tingkat nasional, Indonesia memiliki potensi memperoleh pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang lebih berkelanjutan dan adil di tahun-tahun mendatang.

Daftar Pustaka

- Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral dengan Jepang Studi Kasus: Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 49-61.
<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>
- Bresser-Pereira, L. C. (2019). Models of the developmental state. *CEPAL review*, 2019(128), 35-47.

- Breuer, L. E., & Kinda, T. (2018). Realizing Indonesia's economic potential: An overview. *Realizing Indonesia's economic potential*, 3-21.
- Bhuiyan, M. Z. (2019). The miracle of the Japanese Economy after the Second World War (WW2). *researchgate.net*/, June.
- Fajrin, R. (2022). *Drama Politik Ekonomi Indonesia: Ekonomi Dan Oligarki Orde Baru (1966-1998)* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Forsberg, A. (2000). *America and the Japanese miracle: the Cold War context of Japan's postwar economic revival, 1950-1960*. Univ of North Carolina Press.
- Francks, P. (2015). *Japanese economic development: theory and practice*. Routledge.
- Hadley, E. M. (1984). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. *SAIS Review*, 4(1), 192-198.
- Hardi, I., Ringga, E. S., Fijay, A. H., Maulana, A. R. R., Hadiyani, R., & Idroes, G. M. (2023). Decomposed Impact of Democracy on Indonesia's Economic Growth. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 1(2), 51-60.
- Hidayat, A. (2022). Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Hidayat, O.M., & Zahidi, M.S. (2023). Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral dengan Jepang (IJEPA) di Industri Otomotif. *Jurnal Wacana Global Indonesia*, 5 (1), 57-72.
- James, W. E. (2000). Lessons From Development of the Indonesian Economy. *Education About Asia*, 5(1).
- Jasiah, R., Raliby, O., Hierdawati, T., Pamungkas, B. D., & Ningtyas, S. (2024). Indonesia's economic growth projections 2023-2025: empirical data analysis. *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 345-354.
- Johnson, C. (2001). MITI and the Japanese Miracle. *HARVARD EAST ASIAN MONOGRAPHS*, 515-517.
- Johnson, C. (1982). *MITI dan keajaiban Jepang: pertumbuhan kebijakan industri, 1925-1975*.
- Labib, F., & Lila, S. A. (2023). The Influence of Political Stability on Indonesia's Gross Domestic Product: English. *Asian Economic And Business Development*, 6(1), 31-35.
- Linbland, J. T., Wee, T. K., Purwanto, B., & Suryo, D. (2002). Indonesian economic development and Japanese technology. *Kitakyushu: The International Centre for the Study of East Asian Development*.
- Murti, H. W., & Siregar, M. T. (2021). Studi Perbandingan Kebijakan Industri 4.0 Indonesia dengan Tiga Negara Leading Group Future of Production. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 5(1), 62-74.

- Navigating Indonesia's Economic Growth: Balancing Progress and Sustainability, accessed March 30, 2025, <https://setkab.go.id/navigating-indonesias-economic-growth-balancing-progress-and-sustainability/>
- Nezu, R. (2007). Industrial policy in Japan. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 7(3), 229-243.
- O'Bryan, S. (2009). *The growth idea: purpose and prosperity in postwar Japan*. University of Hawaii Press. Pers Universitas Stanford.
- Okazaki, T. (2017). Industrial Policy in Japan: 70-Year History since World War II. *Economy, Culture & History Japan Spotlight Bimonthly*.
- Panjaitan, T. W. S., Pandyaswargo, A. H., Atmaja, T. D., Firman, F. A., & Irsyad, M. I. A. (2024). Drawing Insights from Japan's Energy Efficiency Policies for Indonesia's Progress. *Indonesian Journal of Energy*, 7(2), 107-123.
- Reed, L. W. (2022). What caused Japan's post-war economic miracle. *Foundation for Economic Education*.
- Resosudarmo, B. P., & Kuncoro, A. (2006). The political economy of Indonesian economic reforms: 1983–2000. *Oxford development studies*, 34(3), 341-355.
- Singh, J. N., & Ovadia, J. S. (2020): The theory and practice of building developmental states in the Global South. In *Developmental states beyond East Asia* (pp. 1-23). Routledge.
- Song, Q. (2022). Political Economy Analysis of Significant Roles of MITI in Japan's Industrial Policies During Japan's Post-war Economic Miracle Period. In *2022 International Conference on Economics, Smart Finance and Contemporary Trade (ESFCT 2022)* (pp. 240-246). Atlantis Press.
- Soehardjo, J., Delbridge, R., & Meardi, G. (2023). The hidden layers of resistance to dominant HRM transfer: Evidence from Japanese management practice adoption in Indonesia. *Economic and Industrial Democracy*, 44(3), 679-702.
- Stott, D. A. (2008). The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals *ASIA-PACIFIC JOURNAL-JAPAN FOCUS*, 6(7).
- Sumiya, M. (2000). *A history of Japanese trade and industry policy*. OUP Oxford.
- Valdés, B. (2003). An Application of Convergence Theory to Japan's Post-WWII Economic "Miracle". *The journal of economic education*, 34(1), 61-81.
- Yamamura, K. (2023). *Economic policy in postwar Japan: growth versus economic democracy*. Univ of California Press.
- Suzuki, T. M. (2020). *History of Japanese economic thought*. Routledge.